

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, hlm. 30
- Achmadi, Cholid Narbuko Abu, 1998, *Metode Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta
- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Humanisms dan Pembalioaran Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Artantojati, Sigit, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. (justice collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (LPSK)*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Ashworth, Andrew, 2000, *Sentencing and Criminal justice, Third Edition*, Butterworths.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2008, *Masa Depan Perlindungan Wliistleblower dan Peran LPSK*, Koalisi Perlindungan Saksi. Jakarta
- , 2008, *Tantangan Perlindungan justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006*, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta
- Gulo, W, 2002, *Metode Penelitian*. PT. Grasindo, Jakarta
- Guy G. Cherry, Claire E. Rossmark, 2011, *Maryland Dimunition Credit System*, Department of Legislative Services, Office of Policy Analysis Annapolis, Maryland, December
- Hamzah, Andi, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Kuffal, HMA, 2010, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Pres
- Laranono, Anton, 2015, *Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Program Magister Universitas Airlangga Surabaya
- Makara, Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1
- Mandagi, Jeanne, 1995, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta
- Meleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Kompisi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator, dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Rouf, Uuf, 2014, *penelitian Kebijakan Legislatif Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*, Program Studi Double Degree Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sagita, Ginia Tia, 2014, *penelitian Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan*

Nomor: 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst), Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Hukum, Purwokerto

Partogi, Edwin, 2017, *Justice Collaborator*, Kompas edisi 15 Maret 2017

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Jakarta

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice Callaborators)*, Usulan dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta

Silaen, Gabriel Francius, 2002, *Peranan Justice Collaborator Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta

Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial suatu tehnik penelitian bidang kesejahteraan Sosial lainnya*. Remaja Rosda Karya, Bandung

Soekanto dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja. Grafindo Persada, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sunarso, Siswanto, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutopo, H.B, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Universitas. Sebelas Maret, Surakarta

Sutopo, HB, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*;:UNS Press, Surakarta

Thurmudhi, Imam, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Usman Husain dan Akbar, Purnomo Setiady, 1995, *Metodologi Penelitian, Cet. I.*
Bumi Aksara, Jakarta

Wijaya, Firman, 2002, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif
Hukum Pidana*, Penaku, Jakarta. 14

Jurnal/Makalah

Agustine, Viana, 2012, *penelitian Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap
"Justice Collaborator, Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*
Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Dwiyanto, Sumirat, 2015, *Indonesia Darurat Narkoba*, Acara Primetime Talk di
Beritasatu TV pada 19 Januari 2015

Fitriasih, Surastini, 2002, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju
Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*, Makalah, MAPPI. FH UI,
Jakarta

Manalu, River Yohanes, 2015, *Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*,
Jurnal, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

Sarwoko, Djoko, *Reward bagi "Whistleblower" (Pelapor Tindak Pidana) dan "justice
Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak
Pidana Tertentu*, Makalah yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah
Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011

Semendawai, Abdul Haris, 2017, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi
Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu
Hukum, Unpad, Jatinangor

Internet

Ini Syarat Seseorang Bisa Jadi Justice Collaborator. Di unduh dari
<http://news.okezone.com> tanggal 20 Mei 2017

Institute for Criminal Justice Reform, 2017, *Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang
Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum*

Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama di unduh dari <http://icjr.or.id> tanggal 20 Mei 2017

Kandi, Rosmiyati Dewi, 2017, *Syarat 'Justice Collaborator' Jadi Kendala Dapatkan Remisi*, *CNN Indonesia*, di unduh dari <http://www.cnnindonesia.com> tanggal 20 Mei 2017

Kramer, Karen, “*Protection of Witnesses and Whistle-Blowers: How to Encourage People to Come Forward to Provide Testimony and Important Information*” di unduh dari www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/fourth_GGSeminar_all.pdf

PBB, 2015, *Indonesia Salah Satu Jalur Utama Penyelundupan Narkoba*, di unduh dari <http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba> 15 Desember 2015

Sarwindaningrum Irene dan Kustiasih, Rini, 2017, *Meninjau Ulang "Justice Collaborator"* di unduh dari <http://nasional.kompas.com> tanggal 18 Mei 2017

Wagiman Wahyu dan Abidin, Zaenal, 2017, *Perlindungan Saksi dan Korban, catatan atas Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur*, di unduh dari <http://www.sinarharapan.co.id>, tanggal 15 Mei 2017

Wahyu. 2017, *Darurat Narkoba di Indonesia: Data dan Fakta yang Mengerikan*, di unduh dari <http://www.kompasiana.com> tanggal 20 Mei 2017

Wijaya, Firman, 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Wawancara

Lilik Pintauli Siregar, Wakil Ketua LPSK, wawancara pada hari Senin, 12 Juni 2017 jam 13.00 wib

Syafrudin Ainur, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Wawancara Tanggal 14 Juni 2017 Jam 09.00 WIB

Ratih Andrawina Suminar, Jaksa Fungsional, wawancara pada hari Kamis, 08 Juni 2017 / 09.30 Wib

Wahyu Susetyo, Kasie Binadik, Wawancara pada hari Rabu, 07 Juni 2017 / 09.30 Wib